BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

OPD | KABAG HUKUM

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

OPD | KABAG HUKUM

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

31. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

33. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

OPD | KABAG HUKUM

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tanun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1);

51 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 6);

52 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Semula berjumlah 1.147.457.240.969,03 berkurang Rp. 103.119.978.142,52 sehingga menjadi Rp. 1.044.337.262.826,51 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 1.121.507.601.470,03	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp (108.422.335.551,24)	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 1.013.085.265.918,79

OPD | KABAG HUKUM

b. Belanja

1. Semula	Rp 1.147.457.240.969,03		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp (103.119.978.142,52)		
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp 1.044.337.262.826,51	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp	(31.251.996.907,72)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan			
a) Semula	Rp 26.949.639.499,00		
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp 8.302.357.408,72		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	35.251.996.907,72
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp 1.000.000.000,00		
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp 3.000.000.000,00		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp	4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp	31.251.996.907,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp 65.728.304.508,13		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 42.999.171,61		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp	65.771.303.679,74

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp 811.938.611.059,90		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp (101.819.184.943,90)		
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp	710.119.426.116,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp 243.840.685.902,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp (6.646.149.778,95)		
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp	237.194.536.123,05

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp 11.555.032.178,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp (570.994.692,00)		
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		Rp	10.984.037.486,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp 4.350.705.973,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 404.132.274,00		
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp	4.754.838.247,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp 4.431.364.507,13		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 326.603.906,34		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp	4.757.968.413,47

OPD | KABAG HUKUM

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp 45.391.201.850,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp (116.742.316,73)	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp 45.274.459.533,27

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp 19.683.334.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 254.735.241,00	
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan		Rp 19.938.069.241,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp 557.660.829.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp (57.047.491.000,00)	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp 500.613.338.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp 234.594.448.059,90	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp (45.026.429.184,90)	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp 189.568.018.875,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

a. Hibah

1. Semula	Rp 40.902.044.900,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 11.524.283.000,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp 52.426.327.900,00

b. Dana darurat

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan		Rp -

c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi

1. Semula	Rp 75.506.856.002,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp (16.754.715.778,95)	
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp 58.752.140.223,05

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah

1. Semula	Rp 127.431.785.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp (1.415.717.000,00)	
Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp 126.016.068.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp 603.957.494.408,68	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 14.872.759.432,08	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp 618.830.253.840,76

OPD	KABAG HUKUM

b. Belanja langsung

1. Semula	Rp	543.499.746.560,35	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(117.992.737.574,60)	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp 425.507.008.985,75

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	389.784.516.085,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.233.796.234,21	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 391.018.312.319,21

b. Belanja bunga sejumlah

1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp -

c. Belanja subsidi

1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp -

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp	17.035.908.400,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.616.040.500,00)	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp 15.419.867.900,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp	250.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp 250.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp	1.590.573.900,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(16.686.200,00)	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp 1.573.887.700,00

g. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp	192.928.581.683,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(9.413.065.000,00)	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp 183.515.516.683,00

h. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp	2.367.914.340,68	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	24.684.754.897,87	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 27.052.669.238,55

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	63.024.388.154,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	5.141.954.909,30	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 68.166.343.063,30

b. Belanja Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp	268.954.472.332,20	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(57.582.939.872,35)	
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 211.371.532.459,85

c. Belanja modal

1. Semula	Rp	211.520.886.074,15	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(65.551.752.611,55)	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp 145.969.133.462,60

OPD | KA... HUK...

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp 26.949.639.499,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 8.302.357.408,72	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp 35.251.996.907,72

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp 1.000.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 3.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp 4.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1. Semula	Rp 26.949.639.499,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 8.302.357.408,72	
Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan		Rp 35.251.996.907,72

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp -	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp -

b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1. Semula	Rp 1.000.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp 3.000.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal (invetasi) daerah setelah Perubahan		Rp 4.000.000.000,00

OPD

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melelalui belanja tidak terduga.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

OPD KABAG HUKUM

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 06/1051/LB/2020

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	1.121.507.601.470,03	1.013.085.265.918,79	(108.422.335.551,24)	(9,67)
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	65.728.304.508,13	65.771.303.679,74	42.999.171,61	0,07
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	11.555.032.178,00	10.984.037.486,00	(570.994.692,00)	(4,94)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.350.705.973,00	4.754.838.247,00	404.132.274,00	9,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.431.364.507,13	4.757.968.413,47	326.603.906,34	7,37
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.391.201.850,00	45.274.459.533,27	(116.742.316,73)	(0,26)
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	811.938.611.059,90	710.119.426.116,00	(101.819.184.943,90)	(12,54)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.683.334.000,00	19.938.069.241,00	254.735.241,00	1,29
1.2.2	Dana Alokasi Umum	557.660.829.000,00	500.613.338.000,00	(57.047.491.000,00)	(10,23)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	234.594.448.059,90	189.568.018.875,00	(45.026.429.184,90)	(19,19)
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	243.840.685.902,00	237.194.536.123,05	(6.646.149.778,95)	(2,73)
1.3.1	Pendapatan Hibah	40.902.044.900,00	52.426.327.900,00	11.524.283.000,00	28,18
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.506.856.002,00	58.752.140.223,05	(16.754.715.778,95)	(22,19)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.431.785.000,00	126.016.068.000,00	(1.415.717.000,00)	(1,11)
2	**BELANJA DAERAH**	1.147.457.240.969,03	1.044.337.262.826,51	(103.119.978.142,52)	(8,99)
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	603.957.494.408,68	618.830.253.840,76	14.872.759.432,08	2,46
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	389.784.516.085,00	391.018.312.319,21	1.233.796.234,21	0,32
2.1.4	BELANJA HIBAH	17.035.908.400,00	15.419.867.900,00	(1.616.040.500,00)	(9,49)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.590.573.900,00	1.573.887.700,00	(16.686.200,00)	(1,05)
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	192.928.581.683,00	183.515.516.683,00	(9.413.065.000,00)	(4,88)
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.367.914.340,68	27.052.669.238,55	24.684.754.897,87	1.042,47

OPD | KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	543.499.746.560,35	425.507.008.985,75	(117.992.737.574,60)	(21,71)
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.024.388.154,00	68.166.343.063,30	5.141.954.909,30	8,16
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268.954.472.332,20	211.371.532.459,85	(57.582.939.872,35)	(21,41)
2.2.3	BELANJA MODAL	211.520.886.074,15	145.969.133.462,60	(65.551.752.611,55)	(30,99)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.949.639.499,00)	(31.251.996.907,72)	(5.302.357.408,72)	20,43
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	26.949.639.499,00	35.251.996.907,72	8.302.357.408,72	30,81
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.949.639.499,00	35.251.996.907,72	8.302.357.408,72	30,81
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	300,00
3.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	300,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.949.639.499,00	31.251.996.907,72	5.302.357.408,72	20,43
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	380,00

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	43.311.085.093,00	42.719.891.771,00	(591.193.322,00)	(1,36)	262.775.740.600,00	370.002.131.948,10	632.777.872.548,10	261.484.254.219,00	297.504.036.697,25	558.988.290.916,25	(73.789.581.631,85)	(11,66)
1.01	**Pendidikan**	98.760.000,00	93.660.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)	201.292.913.200,00	86.077.570.000,00	287.370.483.200,00	203.096.837.124,00	83.987.458.750,00	287.084.295.874,00	(286.187.326,00)	(0,10)
1.01 . 1.01.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	98.760.000,00	93.660.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)	201.292.913.200,00	86.077.570.000,00	287.370.483.200,00	203.096.837.124,00	83.987.458.750,00	287.084.295.874,00	(286.187.326,00)	(0,10)
1.01 . 1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98.760.000,00	93.660.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)	201.292.913.200,00	86.077.570.000,00	287.370.483.200,00	203.096.837.124,00	83.987.458.750,00	287.084.295.874,00	(286.187.326,00)	(0,10)
1.02	**Kesehatan**	43.099.285.093,00	42.513.191.771,00	(586.093.322,00)	(1,36)	47.115.003.100,00	125.227.577.750,99	172.342.580.850,99	43.349.901.888,00	130.650.555.972,25	174.000.457.860,25	1.657.877.009,26	0,96
1.02 . 1.02.01	**Dinas Kesehatan**	15.839.870.893,00	16.309.751.557,00	469.880.664,00	2,97	35.727.152.500,00	76.349.181.556,99	112.076.334.056,99	32.672.775.783,00	79.393.222.772,25	112.065.998.555,25	(10.335.501,74)	(0,01)
1.02 . 1.02.01.01	Dinas Kesehatan	15.839.870.893,00	16.309.751.557,00	469.880.664,00	2,97	35.727.152.500,00	76.349.181.556,99	112.076.334.056,99	32.672.775.783,00	79.393.222.772,25	112.065.998.555,25	(10.335.501,74)	(0,01)
1.02 . 1.02.02	**RSUD Alimuddin Umar**	27.259.414.200,00	26.203.440.214,00	(1.055.973.986,00)	(3,87)	11.387.850.600,00	48.878.396.194,00	60.266.246.794,00	10.677.126.105,00	51.257.333.200,00	61.934.459.305,00	1.668.212.511,00	2,77
1.02 . 1.02.02.01	RSUD Alimuddin Umar	27.259.414.200,00	26.203.440.214,00	(1.055.973.986,00)	(3,87)	11.387.850.600,00	48.878.396.194,00	60.266.246.794,00	10.677.126.105,00	51.257.333.200,00	61.934.459.305,00	1.668.212.511,00	2,77
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	113.040.000,00	113.040.000,00	0,00	0,00	4.864.962.700,00	141.934.371.697,11	146.799.334.397,11	4.864.709.889,00	68.389.128.475,00	73.253.838.364,00	(73.545.496.033,11)	(50,10)
1.03 . 1.03.01	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	113.040.000,00	113.040.000,00	0,00	0,00	4.864.962.700,00	141.228.498.897,11	146.093.461.597,11	4.864.709.889,00	67.599.989.395,00	72.464.699.284,00	(73.628.762.313,11)	(50,40)
1.03 . 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	113.040.000,00	113.040.000,00	0,00	0,00	4.864.962.700,00	141.228.498.897,11	146.093.461.597,11	4.864.709.889,00	67.599.989.395,00	72.464.699.284,00	(73.628.762.313,11)	(50,40)
1.03 . 4.01.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.872.800,00	705.872.800,00	0,00	789.139.080,00	789.139.080,00	83.266.280,00	11,80
1.03 . 4.01.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.872.800,00	705.872.800,00	0,00	789.139.080,00	789.139.080,00	83.266.280,00	11,80
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.524.000,00	5.455.524.000,00	0,00	5.346.016.000,00	5.346.016.000,00	(109.508.000,00)	(2,01)
1.04 . 1.03.01	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.524.000,00	5.455.524.000,00	0,00	5.346.016.000,00	5.346.016.000,00	(109.508.000,00)	(2,01)
1.04 . 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.524.000,00	5.455.524.000,00	0,00	5.346.016.000,00	5.346.016.000,00	(109.508.000,00)	(2,01)
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.705.800,00	5.827.957.450,00	13.105.663.250,00	7.853.962.418,00	5.113.691.350,00	12.967.653.768,00	(138.009.482,00)	(1,05)
1.05 . 1.05.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.705.800,00	5.827.957.450,00	13.105.663.250,00	7.853.962.418,00	5.113.691.350,00	12.967.653.768,00	(138.009.482,00)	(1,05)
1.05 . 1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.705.800,00	5.827.957.450,00	13.105.663.250,00	7.853.962.418,00	5.113.691.350,00	12.967.653.768,00	(138.009.482,00)	(1,05)
1.06	**Sosial**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.155.800,00	5.479.131.050,00	7.704.286.850,00	2.318.842.900,00	4.017.186.150,00	6.336.029.050,00	(1.368.257.800,00)	(17,76)
1.06 . 1.06.01	**Dinas Sosial**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.155.800,00	5.479.131.050,00	7.704.286.850,00	2.318.842.900,00	4.017.186.150,00	6.336.029.050,00	(1.368.257.800,00)	(17,76)

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1.06 . 1.06.01.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.155.800,00	5.479.131.050,00	7.704.286.850,00	2.318.842.900,00	4.017.186.150,00	6.336.029.050,00	(1.368.257.800,00)	(17,76)
2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	1.772.920.730,00	1.568.155.690,00	(204.765.040,00)	(11,55)	28.316.755.150,00	68.053.046.939,00	96.369.802.089,00	33.107.770.036,00	48.580.107.291,50	81.687.877.327,50	(14.681.924.761,50)	(15,23)
2.01	**Tenaga Kerja**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.172.600,00	1.183.172.600,00	0,00	955.048.300,00	955.048.300,00	(228.124.300,00)	(19,28)
2.01 . 2.12.01	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.172.600,00	1.183.172.600,00	0,00	955.048.300,00	955.048.300,00	(228.124.300,00)	(19,28)
2.01 . 2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.172.600,00	1.183.172.600,00	0,00	955.048.300,00	955.048.300,00	(228.124.300,00)	(19,28)
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.109.642,00	1.616.109.642,00	0,00	990.291.109,00	990.291.109,00	(625.818.533,00)	(38,72)
2.02 . 2.08.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.109.642,00	1.616.109.642,00	0,00	990.291.109,00	990.291.109,00	(625.818.533,00)	(38,72)
2.02 . 2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.109.642,00	1.616.109.642,00	0,00	990.291.109,00	990.291.109,00	(625.818.533,00)	(38,72)
2.03	**Pangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.751.150,00	1.713.098.400,00	3.891.849.550,00	2.215.182.862,00	1.442.575.926,50	3.657.758.788,50	(234.090.761,50)	(6,01)
2.03 . 2.03.01	**Dinas Ketahanan Pangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.751.150,00	1.713.098.400,00	3.891.849.550,00	2.215.182.862,00	1.442.575.926,50	3.657.758.788,50	(234.090.761,50)	(6,01)
2.03 . 2.03.01.01	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.751.150,00	1.713.098.400,00	3.891.849.550,00	2.215.182.862,00	1.442.575.926,50	3.657.758.788,50	(234.090.761,50)	(6,01)
2.04	**Pertanahan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.818.000,00	2.724.818.000,00	0,00	809.650.000,00	809.650.000,00	(1.915.168.000,00)	(70,29)
2.04 . 1.03.01	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.818.000,00	2.724.818.000,00	0,00	809.650.000,00	809.650.000,00	(1.915.168.000,00)	(70,29)
2.04 . 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.818.000,00	2.724.818.000,00	0,00	809.650.000,00	809.650.000,00	(1.915.168.000,00)	(70,29)
2.05	**Lingkungan Hidup**	92.090.000,00	93.675.000,00	1.585.000,00	1,72	2.659.735.100,00	10.964.799.966,00	13.624.535.066,00	2.662.237.909,00	9.420.147.117,00	12.082.385.026,00	(1.542.150.040,00)	(11,32)
2.05 . 2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup**	92.090.000,00	93.675.000,00	1.585.000,00	1,72	2.659.735.100,00	10.964.799.966,00	13.624.535.066,00	2.662.237.909,00	9.420.147.117,00	12.082.385.026,00	(1.542.150.040,00)	(11,32)
2.05 . 2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup	92.090.000,00	93.675.000,00	1.585.000,00	1,72	2.659.735.100,00	10.964.799.966,00	13.624.535.066,00	2.662.237.909,00	9.420.147.117,00	12.082.385.026,00	(1.542.150.040,00)	(11,32)
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.837.800,00	3.519.540.280,00	6.285.378.080,00	3.512.191.489,00	3.051.971.060,00	6.564.162.549,00	278.784.469,00	4,44
2.06 . 2.06.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.837.800,00	3.519.540.280,00	6.285.378.080,00	3.512.191.489,00	3.051.971.060,00	6.564.162.549,00	278.784.469,00	4,44
2.06 . 2.06.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.837.800,00	3.519.540.280,00	6.285.378.080,00	3.512.191.489,00	3.051.971.060,00	6.564.162.549,00	278.784.469,00	4,44
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.420.400,00	3.959.834.700,00	6.373.255.100,00	2.630.989.816,00	2.512.081.500,00	5.143.071.316,00	(1.230.183.784,00)	(19,30)
2.07 . 2.07.01	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.420.400,00	3.959.834.700,00	6.373.255.100,00	2.630.989.816,00	2.512.081.500,00	5.143.071.316,00	(1.230.183.784,00)	(19,30)
2.07 . 2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.420.400,00	3.959.834.700,00	6.373.255.100,00	2.630.989.816,00	2.512.081.500,00	5.143.071.316,00	(1.230.183.784,00)	(19,30)
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.439.200,00	6.723.377.300,00	9.486.816.500,00	3.445.699.632,00	5.786.609.600,00	9.232.309.232,00	(254.507.268,00)	(2,68)
2.08 . 2.08.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.439.200,00	6.723.377.300,00	9.486.816.500,00	3.445.699.632,00	5.786.609.600,00	9.232.309.232,00	(254.507.268,00)	(2,68)
2.08 . 2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.439.200,00	6.723.377.300,00	9.486.816.500,00	3.445.699.632,00	5.786.609.600,00	9.232.309.232,00	(254.507.268,00)	(2,68)
2.09	**Perhubungan**	301.560.000,00	165.471.000,00	(136.089.000,00)	(45,13)	2.269.348.300,00	4.734.664.490,00	7.004.012.790,00	4.177.545.504,00	1.615.644.246,00	5.793.189.750,00	(1.210.823.040,00)	(17,29)
2.09 . 2.09.01	**Dinas Perhubungan**	301.560.000,00	165.471.000,00	(136.089.000,00)	(45,13)	2.269.348.300,00	4.734.664.490,00	7.004.012.790,00	4.177.545.504,00	1.615.644.246,00	5.793.189.750,00	(1.210.823.040,00)	(17,29)
2.09 . 2.09.01.01	Dinas Perhubungan	301.560.000,00	165.471.000,00	(136.089.000,00)	(45,13)	2.269.348.300,00	4.734.664.490,00	7.004.012.790,00	4.177.545.504,00	1.615.644.246,00	5.793.189.750,00	(1.210.823.040,00)	(17,29)

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
2.10	**Komunikasi Dan Informatika**	256.188.430,00	282.541.490,00	26.353.060,00	10,29	2.176.509.900,00	21.044.524.905,00	23.221.034.805,00	2.822.497.377,00	17.033.074.608,00	19.855.571.985,00	(3.365.462.820,00)	(14,49)
2.10 . 2.10.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	256.188.430,00	282.541.490,00	26.353.060,00	10,29	2.176.509.900,00	7.053.723.875,00	9.230.233.775,00	2.822.497.377,00	6.267.529.408,00	9.090.026.785,00	(140.206.990,00)	(1,52)
2.10 . 2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	256.188.430,00	282.541.490,00	26.353.060,00	10,29	2.176.509.900,00	7.053.723.875,00	9.230.233.775,00	2.822.497.377,00	6.267.529.408,00	9.090.026.785,00	(140.206.990,00)	(1,52)
2.10 . 5.03.02	**Sekretariat Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990.801.030,00	13.990.801.030,00	0,00	10.765.545.200,00	10.765.545.200,00	(3.225.255.830,00)	(23,05)
2.10 . 5.03.02.01	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990.801.030,00	13.990.801.030,00	0,00	10.765.545.200,00	10.765.545.200,00	(3.225.255.830,00)	(23,05)
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	891.283.800,00	888.283.800,00	(3.000.000,00)	(0,34)	3.012.587.000,00	1.392.406.000,00	4.404.993.000,00	3.104.261.632,00	901.372.469,00	4.005.634.101,00	(399.358.899,00)	(9,07)
2.11 . 2.11.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	891.283.800,00	888.283.800,00	(3.000.000,00)	(0,34)	3.012.587.000,00	1.392.406.000,00	4.404.993.000,00	3.104.261.632,00	901.372.469,00	4.005.634.101,00	(399.358.899,00)	(9,07)
2.11 . 2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	891.283.800,00	888.283.800,00	(3.000.000,00)	(0,34)	3.012.587.000,00	1.392.406.000,00	4.404.993.000,00	3.104.261.632,00	901.372.469,00	4.005.634.101,00	(399.358.899,00)	(9,07)
2.12	**Penanaman Modal**	78.700.000,00	79.000.000,00	300.000,00	0,38	2.438.413.700,00	2.012.112.606,00	4.450.526.306,00	2.521.183.793,00	447.559.106,00	2.968.742.899,00	(1.481.783.407,00)	(33,29)
2.12 . 2.12.01	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**	78.700.000,00	79.000.000,00	300.000,00	0,38	2.438.413.700,00	2.012.112.606,00	4.450.526.306,00	2.521.183.793,00	447.559.106,00	2.968.742.899,00	(1.481.783.407,00)	(33,29)
2.12 . 2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	78.700.000,00	79.000.000,00	300.000,00	0,38	2.438.413.700,00	2.012.112.606,00	4.450.526.306,00	2.521.183.793,00	447.559.106,00	2.968.742.899,00	(1.481.783.407,00)	(33,29)
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**	153.098.500,00	59.184.400,00	(93.914.100,00)	(61,34)	3.741.183.300,00	2.776.587.800,00	6.517.771.100,00	4.014.952.274,00	1.468.248.900,00	5.483.201.174,00	(1.034.569.926,00)	(15,87)
2.13 . 2.13.01	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	153.098.500,00	59.184.400,00	(93.914.100,00)	(61,34)	3.741.183.300,00	2.776.587.800,00	6.517.771.100,00	4.014.952.274,00	1.468.248.900,00	5.483.201.174,00	(1.034.569.926,00)	(15,87)
2.13 . 2.13.01.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	153.098.500,00	59.184.400,00	(93.914.100,00)	(61,34)	3.741.183.300,00	2.776.587.800,00	6.517.771.100,00	4.014.952.274,00	1.468.248.900,00	5.483.201.174,00	(1.034.569.926,00)	(15,87)
2.15	**Persandian**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.539.000,00	152.539.000,00	0,00	105.914.000,00	105.914.000,00	(46.625.000,00)	(30,57)
2.15 . 2.10.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.539.000,00	152.539.000,00	0,00	105.914.000,00	105.914.000,00	(46.625.000,00)	(30,57)
2.15 . 2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.539.000,00	152.539.000,00	0,00	105.914.000,00	105.914.000,00	(46.625.000,00)	(30,57)
2.16	**Kebudayaan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.366.900,00	1.456.366.900,00	0,00	1.029.560.500,00	1.029.560.500,00	(426.806.400,00)	(29,31)
2.16 . 1.01.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.366.900,00	1.456.366.900,00	0,00	1.029.560.500,00	1.029.560.500,00	(426.806.400,00)	(29,31)
2.16 . 1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.366.900,00	1.456.366.900,00	0,00	1.029.560.500,00	1.029.560.500,00	(426.806.400,00)	(29,31)
2.17	**Perpustakaan**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.529.300,00	1.914.714.850,00	3.812.244.150,00	2.001.027.748,00	980.058.850,00	2.981.086.598,00	(831.157.552,00)	(21,80)
2.17 . 2.17.01	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.529.300,00	1.914.714.850,00	3.812.244.150,00	2.001.027.748,00	980.058.850,00	2.981.086.598,00	(831.157.552,00)	(21,80)
2.17 . 2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.529.300,00	1.914.714.850,00	3.812.244.150,00	2.001.027.748,00	980.058.850,00	2.981.086.598,00	(831.157.552,00)	(21,80)
2.18	**Kearsipan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.379.500,00	164.379.500,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	(134.079.500,00)	(81,57)
2.18 . 2.17.01	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.379.500,00	164.379.500,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	(134.079.500,00)	(81,57)
2.18 . 2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.379.500,00	164.379.500,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	(134.079.500,00)	(81,57)
3	**Urusan Pilihan**	82.482.000,00	82.482.000,00	0,00	0,00	12.254.065.100,00	28.554.553.496,00	40.808.618.596,00	11.575.364.211,00	20.299.209.395,00	31.874.573.606,00	(8.934.044.990,00)	(21,89)
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	76.227.000,00	76.227.000,00	0,00	0,00	2.516.573.100,00	4.376.724.431,00	6.893.297.531,00	2.474.852.201,00	3.230.349.503,00	5.705.201.704,00	(1.188.095.827,00)	(17,24)
3.01 . 3.01.01	**Dinas Perikanan**	76.227.000,00	76.227.000,00	0,00	0,00	2.516.573.100,00	4.376.724.431,00	6.893.297.531,00	2.474.852.201,00	3.230.349.503,00	5.705.201.704,00	(1.188.095.827,00)	(17,24)
3.01 . 3.01.01.01	Dinas Perikanan	76.227.000,00	76.227.000,00	0,00	0,00	2.516.573.100,00	4.376.724.431,00	6.893.297.531,00	2.474.852.201,00	3.230.349.503,00	5.705.201.704,00	(1.188.095.827,00)	(17,24)
3.02	**Pariwisata**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.583.679,00	4.871.583.679,00	0,00	3.627.541.019,00	3.627.541.019,00	(1.244.042.660,00)	(25,54)

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
3.02 . 2.13.01	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.583.679,00	4.871.583.679,00	0,00	3.627.541.019,00	3.627.541.019,00	(1.244.042.660,00)	(25,54)
3.02 . 2.13.01.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.583.679,00	4.871.583.679,00	0,00	3.627.541.019,00	3.627.541.019,00	(1.244.042.660,00)	(25,54)
3.03	**Pertanian**	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	0,00	9.737.492.000,00	12.051.802.706,00	21.789.294.706,00	9.100.512.010,00	7.093.632.794,00	16.194.144.804,00	(5.595.149.902,00)	(25,68)
3.03 . 3.03.01	**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267.224.000,00	7.275.509.000,00	13.542.733.000,00	5.735.652.580,00	3.449.668.500,00	9.185.321.080,00	(4.357.411.920,00)	(32,18)
3.03 . 3.03.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267.224.000,00	7.275.509.000,00	13.542.733.000,00	5.735.652.580,00	3.449.668.500,00	9.185.321.080,00	(4.357.411.920,00)	(32,18)
3.03 . 3.03.02	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	0,00	3.470.268.000,00	4.776.293.706,00	8.246.561.706,00	3.364.859.430,00	3.643.964.294,00	7.008.823.724,00	(1.237.737.982,00)	(15,01)
3.03 . 3.03.02.01	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	0,00	3.470.268.000,00	4.776.293.706,00	8.246.561.706,00	3.364.859.430,00	3.643.964.294,00	7.008.823.724,00	(1.237.737.982,00)	(15,01)
3.04	**Kehutanan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.713.480,00	1.763.713.480,00	0,00	1.473.709.850,00	1.473.709.850,00	(290.003.630,00)	(16,44)
3.04 . 4.04.01	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.713.480,00	1.763.713.480,00	0,00	1.473.709.850,00	1.473.709.850,00	(290.003.630,00)	(16,44)
3.04 . 4.04.01.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.713.480,00	1.763.713.480,00	0,00	1.473.709.850,00	1.473.709.850,00	(290.003.630,00)	(16,44)
3.05	**Perdagangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.509.000,00	2.872.509.000,00	0,00	3.317.152.029,00	3.317.152.029,00	444.643.029,00	15,48
3.05 . 2.11.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.509.000,00	2.872.509.000,00	0,00	3.317.152.029,00	3.317.152.029,00	444.643.029,00	15,48
3.05 . 2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.509.000,00	2.872.509.000,00	0,00	3.317.152.029,00	3.317.152.029,00	444.643.029,00	15,48
3.06	**Industri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.220.200,00	2.618.220.200,00	0,00	1.556.824.200,00	1.556.824.200,00	(1.061.396.000,00)	(40,54)
3.06 . 2.11.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.220.200,00	2.618.220.200,00	0,00	1.556.824.200,00	1.556.824.200,00	(1.061.396.000,00)	(40,54)
3.06 . 2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.220.200,00	2.618.220.200,00	0,00	1.556.824.200,00	1.556.824.200,00	(1.061.396.000,00)	(40,54)
4	**Unsur Penunjang**	1.076.315.373.647,03	968.692.996.457,79	(107.622.377.189,24)	(10,00)	237.091.010.309,68	22.862.535.368,00	259.953.545.677,68	252.641.237.643,76	16.909.363.346,00	269.550.600.989,76	9.597.055.312,08	3,69
4.01	**Perencanaan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.828.650,00	5.437.372.900,00	8.102.201.550,00	2.627.490.123,00	3.538.215.900,00	6.165.706.023,00	(1.936.495.527,00)	(23,90)
4.01 . 4.01.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.828.650,00	4.214.251.800,00	6.879.080.450,00	2.627.490.123,00	2.940.059.600,00	5.567.549.723,00	(1.311.530.727,00)	(19,07)
4.01 . 4.01.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.828.650,00	4.214.251.800,00	6.879.080.450,00	2.627.490.123,00	2.940.059.600,00	5.567.549.723,00	(1.311.530.727,00)	(19,07)
4.01 . 5.03.02	**Sekretariat Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.121.100,00	1.223.121.100,00	0,00	598.156.300,00	598.156.300,00	(624.964.800,00)	(51,10)
4.01 . 5.03.02.01	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.121.100,00	1.223.121.100,00	0,00	598.156.300,00	598.156.300,00	(624.964.800,00)	(51,10)
4.02	**Keuangan**	1.076.315.373.647,03	968.692.996.457,79	(107.622.377.189,24)	(10,00)	227.769.238.459,68	8.819.915.300,00	236.589.153.759,68	243.927.277.580,76	7.784.856.800,00	251.712.134.380,76	15.122.980.621,08	6,39
4.02 . 4.02.01	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**	20.536.076.685,13	21.379.034.218,74	842.957.533,61	4,10	13.596.260.136,00	8.819.915.300,00	22.416.175.436,00	16.115.336.059,21	7.784.856.800,00	23.900.192.859,21	1.484.017.423,21	6,62
4.02 . 4.02.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	20.536.076.685,13	21.379.034.218,74	842.957.533,61	4,10	13.596.260.136,00	8.819.915.300,00	22.416.175.436,00	16.115.336.059,21	7.784.856.800,00	23.900.192.859,21	1.484.017.423,21	6,62
4.02 . 4.02.02	**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**	1.055.779.296.961,90	947.313.962.239,05	(108.465.334.722,85)	(10,27)	214.172.978.323,68	0,00	214.172.978.323,68	227.811.941.521,55	0,00	227.811.941.521,55	13.638.963.197,87	6,37
4.02 . 4.02.02.01	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.055.779.296.961,90	947.313.962.239,05	(108.465.334.722,85)	(10,27)	214.172.978.323,68	0,00	214.172.978.323,68	227.811.941.521,55	0,00	227.811.941.521,55	13.638.963.197,87	6,37
4.03	**Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.547.600,00	4.341.279.468,00	6.797.827.068,00	1.982.384.009,00	2.770.556.146,00	4.752.940.155,00	(2.044.886.913,00)	(30,08)
4.03 . 4.03.01	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.547.600,00	4.341.279.468,00	6.797.827.068,00	1.982.384.009,00	2.770.556.146,00	4.752.940.155,00	(2.044.886.913,00)	(30,08)
4.03 . 4.03.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.547.600,00	4.341.279.468,00	6.797.827.068,00	1.982.384.009,00	2.770.556.146,00	4.752.940.155,00	(2.044.886.913,00)	(30,08)
4.04	**Penelitian dan Pengembangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.818.400,00	1.203.440.000,00	3.257.258.400,00	2.065.649.422,00	641.700.000,00	2.707.349.422,00	(549.908.978,00)	(16,88)

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.04 . 4.04.01	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.818.400,00	1.203.440.000,00	3.257.258.400,00	2.065.649.422,00	641.700.000,00	2.707.349.422,00	(549.908.978,00)	(16,88)
4.04 . 4.04.01.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.818.400,00	1.203.440.000,00	3.257.258.400,00	2.065.649.422,00	641.700.000,00	2.707.349.422,00	(549.908.978,00)	(16,88)
4.05	**Penanggulangan Bencana Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.577.200,00	3.060.527.700,00	5.207.104.900,00	2.038.436.509,00	2.174.034.500,00	4.212.471.009,00	(994.633.891,00)	(19,10)
4.05 . 4.05.01	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.577.200,00	3.060.527.700,00	5.207.104.900,00	2.038.436.509,00	2.174.034.500,00	4.212.471.009,00	(994.633.891,00)	(19,10)
4.05 . 4.05.01.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.577.200,00	3.060.527.700,00	5.207.104.900,00	2.038.436.509,00	2.174.034.500,00	4.212.471.009,00	(994.633.891,00)	(19,10)
5	**Unsur Pendukung**	25.740.000,00	21.740.000,00	(4.000.000,00)	(15,54)	63.519.923.249,00	54.027.478.809,25	117.547.402.058,25	60.021.627.731,00	42.214.292.256,00	102.235.919.987,00	(15.311.482.071,25)	(13,03)
5.01	**Kantor Kesbang dan Politik**	0,00	0,00	0,00	0,00	822.443.299,00	963.668.000,00	1.786.111.299,00	706.422.666,00	635.401.500,00	1.341.824.166,00	(444.287.133,00)	(24,87)
5.01 . 5.01.01	**Kantor Kesbang dan Politik**	0,00	0,00	0,00	0,00	822.443.299,00	963.668.000,00	1.786.111.299,00	706.422.666,00	635.401.500,00	1.341.824.166,00	(444.287.133,00)	(24,87)
5.01 . 5.01.01.01	Kantor Kesbang dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	822.443.299,00	963.668.000,00	1.786.111.299,00	706.422.666,00	635.401.500,00	1.341.824.166,00	(444.287.133,00)	(24,87)
5.02	**Sekretariat DPRD**	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.329.300,00	24.783.012.670,00	39.898.341.970,00	15.374.488.439,00	20.619.253.310,00	35.993.741.749,00	(3.904.600.221,00)	(9,79)
5.02 . 5.02.01	**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322.665.300,00	0,00	12.322.665.300,00	12.322.665.300,00	0,00	12.322.665.300,00	0,00	0,00
5.02 . 5.02.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322.665.300,00	0,00	12.322.665.300,00	12.322.665.300,00	0,00	12.322.665.300,00	0,00	0,00
5.02 . 5.02.02	**Sekretariat DPRD**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.664.000,00	24.783.012.670,00	27.575.676.670,00	3.051.823.139,00	20.619.253.310,00	23.671.076.449,00	(3.904.600.221,00)	(14,16)
5.02 . 5.02.02.01	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.664.000,00	24.783.012.670,00	27.575.676.670,00	3.051.823.139,00	20.619.253.310,00	23.671.076.449,00	(3.904.600.221,00)	(14,16)
5.03	**Sekretariat Daerah**	25.740.000,00	21.740.000,00	(4.000.000,00)	(15,54)	38.366.038.300,00	17.360.079.500,00	55.726.117.800,00	33.991.395.222,00	11.079.232.600,00	45.070.627.822,00	(10.655.489.978,00)	(19,12)
5.03 . 5.03.01	**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	560.351.000,00	0,00	560.351.000,00	561.546.800,00	0,00	561.546.800,00	1.195.800,00	0,21
5.03 . 5.03.01.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	560.351.000,00	0,00	560.351.000,00	561.546.800,00	0,00	561.546.800,00	1.195.800,00	0,21
5.03 . 5.03.02	**Sekretariat Daerah**	25.740.000,00	21.740.000,00	(4.000.000,00)	(15,54)	37.805.687.300,00	17.360.079.500,00	55.165.766.800,00	33.429.848.422,00	11.079.232.600,00	44.509.081.022,00	(10.656.685.778,00)	(19,32)
5.03 . 5.03.02.01	Sekretariat Daerah	25.740.000,00	21.740.000,00	(4.000.000,00)	(15,54)	37.805.687.300,00	17.360.079.500,00	55.165.766.800,00	33.429.848.422,00	11.079.232.600,00	44.509.081.022,00	(10.656.685.778,00)	(19,32)
5.04	**Inspektorat**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.329.350,00	2.558.940.700,00	6.777.270.050,00	5.159.072.113,00	2.109.754.300,00	7.268.826.413,00	491.556.363,00	7,25
5.04 . 5.04.01	**Inspektorat Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.329.350,00	2.558.940.700,00	6.777.270.050,00	5.159.072.113,00	2.109.754.300,00	7.268.826.413,00	491.556.363,00	7,25
5.04 . 5.04.01.01	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.329.350,00	2.558.940.700,00	6.777.270.050,00	5.159.072.113,00	2.109.754.300,00	7.268.826.413,00	491.556.363,00	7,25
5.05	**Kecamatan**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997.783.000,00	8.361.777.939,25	13.359.560.939,25	4.790.249.291,00	7.770.650.546,00	12.560.899.837,00	(798.661.102,25)	(5,98)
5.05 . 5.05.01	**Kecamatan Sumber Jaya**	0,00	0,00	0,00	0,00	269.367.000,00	1.151.438.100,00	1.420.805.100,00	329.607.156,00	1.114.803.400,00	1.444.410.556,00	23.605.456,00	1,66
5.05 . 5.05.01.01	Kecamatan Sumber Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	269.367.000,00	1.151.438.100,00	1.420.805.100,00	329.607.156,00	1.114.803.400,00	1.444.410.556,00	23.605.456,00	1,66
5.05 . 5.05.02	**Kecamatan Way Tenong**	0,00	0,00	0,00	0,00	392.385.000,00	1.183.073.140,00	1.575.458.140,00	386.630.000,00	1.145.043.646,00	1.531.673.646,00	(43.784.494,00)	(2,78)
5.05 . 5.05.02.01	Kecamatan Way Tenong	0,00	0,00	0,00	0,00	392.385.000,00	1.183.073.140,00	1.575.458.140,00	386.630.000,00	1.145.043.646,00	1.531.673.646,00	(43.784.494,00)	(2,78)
5.05 . 5.05.03	**Kecamatan Sekincau**	0,00	0,00	0,00	0,00	448.945.000,00	1.198.930.280,00	1.647.875.280,00	412.328.000,00	1.163.705.750,00	1.576.033.750,00	(71.841.530,00)	(4,36)
5.05 . 5.05.03.01	Kecamatan Sekincau	0,00	0,00	0,00	0,00	448.945.000,00	1.198.930.280,00	1.647.875.280,00	412.328.000,00	1.163.705.750,00	1.576.033.750,00	(71.841.530,00)	(4,36)
5.05 . 5.05.04	**Kecamatan Belalau**	0,00	0,00	0,00	0,00	366.933.000,00	235.461.000,00	602.394.000,00	401.184.625,00	199.211.000,00	600.395.625,00	(1.998.375,00)	(0,33)
5.05 . 5.05.04.01	Kecamatan Belalau	0,00	0,00	0,00	0,00	366.933.000,00	235.461.000,00	602.394.000,00	401.184.625,00	199.211.000,00	600.395.625,00	(1.998.375,00)	(0,33)

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
5.05 . 5.05.05	**Kecamatan Batu Brak**	0,00	0,00	0,00	0,00	321.685.000,00	253.348.800,00	575.033.800,00	296.545.677,00	214.580.300,00	511.125.977,00	(63.907.823,00)	(11,11)
5.05 . 5.05.05.01	Kecamatan Batu Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	321.685.000,00	253.348.800,00	575.033.800,00	296.545.677,00	214.580.300,00	511.125.977,00	(63.907.823,00)	(11,11)
5.05 . 5.05.06	**Kecamatan Balik Bukit**	0,00	0,00	0,00	0,00	504.091.000,00	2.093.376.319,25	2.597.467.319,25	513.618.000,00	2.043.003.950,00	2.556.621.950,00	(40.845.369,25)	(1,57)
5.05 . 5.05.06.01	Kecamatan Balik Bukit	0,00	0,00	0,00	0,00	504.091.000,00	2.093.376.319,25	2.597.467.319,25	513.618.000,00	2.043.003.950,00	2.556.621.950,00	(40.845.369,25)	(1,57)
5.05 . 5.05.07	**Kecamatan Sukau**	0,00	0,00	0,00	0,00	364.105.000,00	260.939.000,00	625.044.000,00	318.301.833,00	221.689.000,00	539.990.833,00	(85.053.167,00)	(13,61)
5.05 . 5.05.07.01	Kecamatan Sukau	0,00	0,00	0,00	0,00	364.105.000,00	260.939.000,00	625.044.000,00	318.301.833,00	221.689.000,00	539.990.833,00	(85.053.167,00)	(13,61)
5.05 . 5.05.08	**Kecamatan Suoh**	0,00	0,00	0,00	0,00	306.131.000,00	235.602.800,00	541.733.800,00	262.282.500,00	195.333.800,00	457.616.300,00	(84.117.500,00)	(15,53)
5.05 . 5.05.08.01	Kecamatan Suoh	0,00	0,00	0,00	0,00	306.131.000,00	235.602.800,00	541.733.800,00	262.282.500,00	195.333.800,00	457.616.300,00	(84.117.500,00)	(15,53)
5.05 . 5.05.09	**Kecamatan Gedung Surian**	0,00	0,00	0,00	0,00	299.061.000,00	235.610.950,00	534.671.950,00	259.162.000,00	203.927.450,00	463.089.450,00	(71.582.500,00)	(13,39)
5.05 . 5.05.09.01	Kecamatan Gedung Surian	0,00	0,00	0,00	0,00	299.061.000,00	235.610.950,00	534.671.950,00	259.162.000,00	203.927.450,00	463.089.450,00	(71.582.500,00)	(13,39)
5.05 . 5.05.10	**Kecamatan Kebun Tebu**	0,00	0,00	0,00	0,00	284.921.000,00	262.945.000,00	547.866.000,00	254.684.000,00	224.038.500,00	478.722.500,00	(69.143.500,00)	(12,62)
5.05 . 5.05.10.01	Kecamatan Kebun Tebu	0,00	0,00	0,00	0,00	284.921.000,00	262.945.000,00	547.866.000,00	254.684.000,00	224.038.500,00	478.722.500,00	(69.143.500,00)	(12,62)
5.05 . 5.05.11	**Kecamatan Air Hitam**	0,00	0,00	0,00	0,00	296.233.000,00	242.427.000,00	538.660.000,00	312.428.000,00	200.510.000,00	512.938.000,00	(25.722.000,00)	(4,78)
5.05 . 5.05.11.01	Kecamatan Air Hitam	0,00	0,00	0,00	0,00	296.233.000,00	242.427.000,00	538.660.000,00	312.428.000,00	200.510.000,00	512.938.000,00	(25.722.000,00)	(4,78)
5.05 . 5.05.12	**Kecamatan Pagar dewa**	0,00	0,00	0,00	0,00	266.539.000,00	246.300.950,00	512.839.950,00	277.983.000,00	206.506.250,00	484.489.250,00	(28.350.700,00)	(5,53)
5.05 . 5.05.12.01	Kecamatan Pagar dewa	0,00	0,00	0,00	0,00	266.539.000,00	246.300.950,00	512.839.950,00	277.983.000,00	206.506.250,00	484.489.250,00	(28.350.700,00)	(5,53)
5.05 . 5.05.13	**Kecamatan Batu Ketulis**	0,00	0,00	0,00	0,00	301.889.000,00	263.639.750,00	565.528.750,00	267.992.500,00	217.205.600,00	485.198.100,00	(80.330.650,00)	(14,20)
5.05 . 5.05.13.01	Kecamatan Batu Ketulis	0,00	0,00	0,00	0,00	301.889.000,00	263.639.750,00	565.528.750,00	267.992.500,00	217.205.600,00	485.198.100,00	(80.330.650,00)	(14,20)
5.05 . 5.05.14	**Kecamatan Bandar Negeri Suoh**	0,00	0,00	0,00	0,00	286.335.000,00	246.023.900,00	532.358.900,00	242.549.500,00	200.293.750,00	442.843.250,00	(89.515.650,00)	(16,81)
5.05 . 5.05.14.01	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	0,00	0,00	0,00	0,00	286.335.000,00	246.023.900,00	532.358.900,00	242.549.500,00	200.293.750,00	442.843.250,00	(89.515.650,00)	(16,81)
5.05 . 5.05.15	**Kecamatan Lumbok Seminung**	0,00	0,00	0,00	0,00	289.163.000,00	252.660.950,00	541.823.950,00	254.952.500,00	220.798.150,00	475.750.650,00	(66.073.300,00)	(12,19)
5.05 . 5.05.15.01	Kecamatan Lumbok Seminung	0,00	0,00	0,00	0,00	289.163.000,00	252.660.950,00	541.823.950,00	254.952.500,00	220.798.150,00	475.750.650,00	(66.073.300,00)	(12,19)
JUMLAH		1.121.507.601.470,03	1.013.085.265.918,79	(108.422.335.551,24)	(9,67)	603.957.494.408,68	543.499.746.560,35	1.147.457.240.969,03	618.830.253.840,76	425.507.008.985,75	1.044.337.262.826,51	(103.119.978.142,52)	(8,99)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	98.760.000,00	93.660.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	98.760.000,00	93.660.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	98.760.000,00	93.660.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)	
1.01.1.01.01.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	288.826.850.100,00	288.113.856.374,00	(712.993.726,00)	(0,25)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	201.292.913.200,00	203.096.837.124,00	1.803.923.924,00	0,90	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	201.292.913.200,00	203.096.837.124,00	1.803.923.924,00	0,90	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	87.533.936.900,00	85.017.019.250,00	(2.515.917.650,00)	(2,88)	
1.01.1.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	385.177.500,00	268.166.500,00	(117.011.000,00)	(30,38)	
1.01.1.01.01.01.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	11.000.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	20,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	20,00	
1.01.1.01.01.01.03	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.03 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.04	*Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.04 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.05	*Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	8.305.500,00	8.305.500,00	0,00	0,00	

OPD | KABAG HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5 . 05 Unsur Pendukung Kecamatan
Organisasi : 5 . 05 . 15 Kecamatan Lumbok Seminung
Sub Unit Organisasi : 5 . 05 . 15 . 01 Kecamatan Lumbok Seminung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05 . 5.05.15 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	541.823.950,00	475.750.650,00	(66.073.300,00)	(12,19)	
5.05 . 5.05.15 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	289.163.000,00	254.952.500,00	(34.210.500,00)	(11,83)	
5.05 . 5.05.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	BELANJA PEGAWAI	289.163.000,00	254.952.500,00	(34.210.500,00)	(11,83)	-
5.05 . 5.05.15 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	252.660.950,00	220.798.150,00	(31.862.800,00)	(12,61)	
5.05 . 5.05.15 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	139.053.650,00	114.507.400,00	(24.546.250,00)	(17,65)	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 02	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 03	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 04	*Penyediaan jasa Administrasi keuangan*	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 05	*Penyediaan jasa kebersihan kantor*	12.221.000,00	12.221.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.021.000,00	8.021.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 06	*Penyediaan Alat Tulis Kantor*	15.141.500,00	15.141.500,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.141.500,00	15.141.500,00	0,00	0,00	

OPD KABAG HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05 . 5.05.15 . 01 . 07	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	17.912.400,00	17.912.400,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.912.400,00	17.912.400,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 08	*Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	3.194.000,00	3.194.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.194.000,00	3.194.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 09	*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 10	*Penyediaan makanan dan minuman*	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 11	*Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	10.690.000,00	0,00	(10.690.000,00)	(100,00)	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.690.000,00	0,00	(10.690.000,00)	(100,00)	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 12	*Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis*	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 13	*Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran*	9.856.250,00	0,00	(9.856.250,00)	(100,00)	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.856.250,00	0,00	(9.856.250,00)	(100,00)	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 14	*Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah*	17.401.000,00	13.401.000,00	(4.000.000,00)	(22,99)	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.401.000,00	13.401.000,00	(4.000.000,00)	(22,99)	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 15	*Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan*	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	52.457.300,00	47.140.750,00	(5.316.550,00)	(10,14)	
5.05 . 5.05.15 . 02 . 04	*Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*	13.008.700,00	13.008.700,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.008.700,00	13.008.700,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 02 . 05	*Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional*	31.715.000,00	31.715.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.715.000,00	31.715.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 02 . 06	*Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor*	7.733.600,00	2.417.050,00	(5.316.550,00)	(68,75)	
5.05 . 5.05.15 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.733.600,00	2.417.050,00	(5.316.550,00)	(68,75)	
5.05 . 5.05.15 . 03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
5.05 . 5.05.15 . 03 . 01	*Pendidikan dan pelatihan Formal*	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	

OPD | KABAG HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05 . 5.05.15 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
5.05 . 5.05.15 . 04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD**	56.150.000,00	56.150.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 01	*Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 02	*Penyusunan laporan keuangan semesteran*	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 03	*Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran*	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 04	*Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun*	2.549.000,00	2.549.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.549.000,00	2.549.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 05	*Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah*	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1	BELANJA PEGAWAI	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	
5.05 . 5.05.15 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(541.823.950,00)	(475.750.650,00)	66.073.300,00	(12,19)	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN			JUMLAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA				JENIS BELANJA					
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	49.215.134.582,00	182.023.358.706,20	190.753.434.579,90	320.002.131.948,10	55.261.523.853,30	123.967.410.400,35	219.390.388.504,00	397.504.085.497,25	(77.498.095.250,85)	(24,39)
1.01	Pendidikan	1.229.270.000,00	29.408.378.400,00	45.445.918.800,00	86.007.579.800,00	15.028.405.000,00	26.699.807.300,00	42.970.240.250,00	83.987.452.750,00	(2.020.127.250,00)	(2,43)
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.229.270.000,00	29.408.378.400,00	45.445.918.800,00	86.007.579.800,00	15.028.405.000,00	26.699.807.300,00	42.970.240.250,00	83.987.452.750,00	(2.020.127.250,00)	(2,43)
1.01 . 1.01.01 . 01	*Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran*	7.800.000,00	379.372.500,00	0,00	387.172.500,00	4.200.000,00	287.068.500,00	0,00	291.268.500,00	(95.904.000,00)	(24,76)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	2.200.000,00	20,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	17.825.000,00	0,00	17.825.000,00	0,00	17.825.000,00	0,00	17.825.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.200.000,00	4.105.500,00	0,00	8.305.500,00	4.200.000,00	4.105.500,00	0,00	8.305.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	30.214.000,00	0,00	30.214.000,00	0,00	30.214.000,00	0,00	30.214.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	67.577.000,00	0,00	67.577.000,00	0,00	58.453.000,00	0,00	58.453.000,00	(9.124.000,00)	(13,50)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	29.116.000,00	0,00	29.116.000,00	0,00	29.116.000,00	0,00	29.116.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0,00	68.508.000,00	0,00	68.508.000,00	0,00	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	(38.628.000,00)	(56,39)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Jasa Pengadaan/Publikasi/Pameran	3.400.000,00	47.152.000,00	0,00	50.752.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(10.752.000,00)	(21,18)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	0,00	73.525.000,00	0,00	73.525.000,00	0,00	25.950.000,00	0,00	25.950.000,00	(47.575.000,00)	(64,71)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Telpon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02	*Program: Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur*	2.880.000,00	367.048.000,00	55.405.000,00	425.333.000,00	2.880.000,00	367.680.800,00	46.209.000,00	417.577.800,00	(7.755.200,00)	(1,82)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 06	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.308.000,00	20.308.000,00	308.000,00	1,54
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.880.000,00	7.055.000,00	0,00	9.935.000,00	2.880.000,00	7.055.000,00	0,00	9.935.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	359.993.000,00	0,00	359.993.000,00	0,00	360.625.800,00	0,00	360.625.800,00	632.800,00	0,18
1.01 . 1.01.01 . 02 . 08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	26.205.000,00	26.205.000,00	0,00	0,00	26.209.000,00	26.209.000,00	4.000,00	0,02

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH		
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
5.05 . 5.05.15 . 04 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	0,00	0,00
5.05 . 5.05.15 . 04 . 05	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	49.600.000,00	200.000,00	0,00	49.800.000,00	49.600.000,00	200.000,00	0,00	49.800.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	63.024.388.154,00	268.954.472.332,20	211.520.886.074,15	543.499.746.560,35	71.117.822.145,30	274.970.032.800,85	235.319.730.573,00	425.507.008.985,75	(117.992.737.574,60)	(21,71)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkd	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Kpembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE			URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						JUMLAH (Rp)	%
1			2	3	4	5= 4 - 3	6
01			**PELAYANAN UMUM**	398.935.871.241,93	390.300.268.795,76	(8.635.602.446,17)	(2,16)
01	2	10	Komunikasi Dan Informatika	23.221.034.805,00	19.855.571.985,00	(3.365.462.820,00)	(14,49)
01	4	01	Perencanaan	8.102.201.550,00	6.165.706.023,00	(1.936.495.527,00)	(23,90)
01	4	02	Keuangan	236.589.153.759,68	251.712.134.380,76	15.122.980.621,08	6,39
01	4	03	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	6.797.827.068,00	4.752.940.155,00	(2.044.886.913,00)	(30,08)
01	4	04	Penelitian dan Pengembangan	3.257.258.400,00	2.707.349.422,00	(549.908.978,00)	(16,88)
01	4	05	Penanggulangan Bencana Daerah	5.207.104.900,00	4.212.471.009,00	(994.633.891,00)	(19,10)
01	5	02	Sekretariat DPRD	39.898.341.970,00	35.993.741.749,00	(3.904.600.221,00)	(9,79)
01	5	03	Sekretariat Daerah	55.726.117.800,00	45.070.627.822,00	(10.655.489.978,00)	(19,12)
01	5	04	Inspektorat	6.777.270.050,00	7.268.826.413,00	491.556.363,00	7,25
01	5	05	Kecamatan	13.359.560.939,25	12.560.899.837,00	(798.661.102,25)	(5,98)
02			**KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN**	15.044.313.549,00	14.415.391.934,00	(628.921.615,00)	(4,18)
02	1	05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.105.663.250,00	12.967.653.768,00	(138.009.482,00)	(1,05)
02	2	15	Persandian	152.539.000,00	105.914.000,00	(46.625.000,00)	(30,57)
02	5	01	Kantor Kesbang dan Politik	1.786.111.299,00	1.341.824.166,00	(444.287.133,00)	(24,87)
03			**EKONOMI**	61.481.130.783,00	49.296.767.891,50	(12.184.362.891,50)	(19,82)
03	2	01	Tenaga Kerja	1.183.172.600,00	955.048.300,00	(228.124.300,00)	(19,28)
03	2	03	Pangan	3.891.849.550,00	3.657.758.788,50	(234.090.761,50)	(6,01)
03	2	07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.373.255.100,00	5.143.071.316,00	(1.230.183.784,00)	(19,30)
03	2	09	Perhubungan	7.004.012.790,00	5.793.189.750,00	(1.210.823.040,00)	(17,29)
03	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.404.993.000,00	4.005.634.101,00	(399.358.899,00)	(9,07)
03	2	12	Penanaman Modal	4.450.526.306,00	2.968.742.899,00	(1.481.783.407,00)	(33,29)
03	3	01	Kelautan dan Perikanan	6.893.297.531,00	5.705.201.704,00	(1.188.095.827,00)	(17,24)
03	3	03	Pertanian	21.789.294.706,00	16.194.144.804,00	(5.595.149.902,00)	(25,68)
03	3	05	Perdagangan	2.872.509.000,00	3.317.152.029,00	444.643.029,00	15,48
03	3	06	Industri	2.618.220.200,00	1.556.824.200,00	(1.061.396.000,00)	(40,54)

OPD KABAG HUKUM

KODE			URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						JUMLAH (Rp)	%
1			2	3	4	5= 4 - 3	6
04			**LINGKUNGAN HIDUP**	15.388.248.546,00	13.556.094.876,00	(1.832.153.670,00)	(11,91)
04	2	05	Lingkungan Hidup	13.624.535.066,00	12.082.385.026,00	(1.542.150.040,00)	(11,32)
04	3	04	Kehutanan	1.763.713.480,00	1.473.709.850,00	(290.003.630,00)	(16,44)
05			**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	154.979.676.397,11	79.409.504.364,00	(75.570.172.033,11)	(48,76)
05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.799.334.397,11	73.253.838.364,00	(73.545.496.033,11)	(50,10)
05	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.455.524.000,00	5.346.016.000,00	(109.508.000,00)	(2,01)
05	2	04	Pertanahan	2.724.818.000,00	809.650.000,00	(1.915.168.000,00)	(70,29)
06			**KESEHATAN**	181.829.397.350,99	183.232.767.092,25	1.403.369.741,26	0,77
06	1	02	Kesehatan	172.342.580.850,99	174.000.457.860,25	1.657.877.009,26	0,96
06	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.486.816.500,00	9.232.309.232,00	(254.507.268,00)	(2,68)
07			**PARIWISATA DAN BUDAYA**	12.845.721.679,00	10.140.302.693,00	(2.705.418.986,00)	(21,06)
07	2	13	Kepemudaan dan Olahraga	6.517.771.100,00	5.483.201.174,00	(1.034.569.926,00)	(15,87)
07	2	16	Kebudayaan	1.456.366.900,00	1.029.560.500,00	(426.806.400,00)	(29,31)
07	3	02	Pariwisata	4.871.583.679,00	3.627.541.019,00	(1.244.042.660,00)	(25,54)
08			**PENDIDIKAN**	291.347.106.850,00	290.095.682.472,00	(1.251.424.378,00)	(0,43)
08	1	01	Pendidikan	287.370.483.200,00	287.084.295.874,00	(286.187.326,00)	(0,10)
08	2	17	Perpustakaan	3.812.244.150,00	2.981.086.598,00	(831.157.552,00)	(21,80)
08	2	18	Kearsipan	164.379.500,00	30.300.000,00	(134.079.500,00)	(81,57)
09			**PERLINDUNGAN SOSIAL**	15.605.774.572,00	13.890.482.708,00	(1.715.291.864,00)	(10,99)
09	1	06	Sosial	7.704.286.850,00	6.336.029.050,00	(1.368.257.800,00)	(17,76)
09	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.616.109.642,00	990.291.109,00	(625.818.533,00)	(38,72)
09	2	06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.285.378.080,00	6.564.162.549,00	278.784.469,00	4,44
				1.147.457.240.969,03	1.044.337.262.826,51	(103.119.978.142,52)	(8,99)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	BPPemberdayaan	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON					JUMLAH
						TENAGA FUNGSIONAL				STAF	
	I	II	III	IV	V	inspektorat	kesehatan	pendidikan	pertanian	STRUKTURAL	
Golongan IV/e											-
Golongan IV/d		1									1
Golongan IV/c		22				-		7		7	36
Golongan IV/b		2	55	-		1	2	345	1	1	407
Golongan IV/a		1	78	21		4	10	416	7	10	547
JUMLAH GOLONGAN IV	-	26	133	21	-	5	12	768	8	18	991
Golongan III/d			27	197		5	91	323	4	22	669
Golongan III/c			3	231		3	59	274	5	48	623
Golongan III/b				84		2	110	221	2	187	606
Golongan III/a				3			48	176	2	270	499
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	30	515	-	10	308	994	13	527	2.397
Golongan II/d							32	37	-	49	118
Golongan II/c							96	21	-	128	245
Golongan II/b						1	3	34	1	75	114
Golongan II/a						1		19	-	31	51
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	2	131	111	1	283	528
Golongan I/d										1	1
Golongan I/c										6	6
Golongan I/b										8	8
Golongan I/a									-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
TOTAL	-	26	163	536	-	17	451	1.873	22	843	3.931

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jml modal (investasi) yg akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan s.d. tahun ini
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10=6-9*	*11*	*12*	*13=9-12*
1	2020	PT.Bank Lampung	Perda propinsi Dati I Lampung No. 15 Th. 1992 Tg. 10/12/1992 Tentang Bank Pembangunan Lampung	Penyertaan Modal	1.000.000.000	10.207.728.061	4.000.000.000	14.207.728.061				
	JUMLAH				1.000.000.000,00	10.207.728.061,43	4.000.000.000,00	14.207.728.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2019		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2020	
			APBD TA 2019	Perubahan APBD TA 2019		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.	N I H I L						
4.							
5.							
dst.							
JUMLAH							

*) coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Pembangunan	
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah	Bunga	pokok Pinjaman Daerah	Bunga
								(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N I H I L											

*) coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS